

PENGARUH DANA PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, SILPA, DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA KEUANGAN

Raden Ayu Siska Framanita^{1*} Maria² and Sarikadarwati³

Departement of Accounting, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Email Address: *siskaframanita20@gmail.com**, *mariamardjuki@polsri.ac.id*,
sarikadarwati@polsri.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh Transfer Pendapatan Antarpemerintah, Belanja Modal, Surplus Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatra. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini menganalisis data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK RI untuk periode 2022–2024. Dari 420 potensi observasi, sebanyak 417 observasi disertakan dalam analisis karena ketersediaan data. Metode regresi data panel menggunakan perangkat lunak E-Views 12 dan *Random Effect Model* (REM) diterapkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Transfer Pendapatan Antarpemerintah, SILPA, dan *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, seluruh variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatra.

Kata kunci: Transfer Antarpemerintah, Belanja Modal, SILPA, *Leverage*, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Abstract

This study examines the effects of Intergovernmental Revenue Transfers, Capital Expenditure, Budget Financing Surplus (SILPA), and Leverage on the Financial Performance of regency and municipal governments in Sumatra. Using a quantitative approach, the study analyzes secondary data from BPK RI-audited Regional Government Financial Statements (LKPD) for 2022–2024. From 420 potential observations, 417 were included due to data availability. Panel data regression using E-Views 12 and the Random Effect Model (REM) was employed. The findings reveal that Capital Expenditure has a positive and significant effect on Financial Performance, while Intergovernmental Revenue Transfers, SILPA, and Leverage have no significant individual effects. However, all independent variables jointly have a significant influence on the Financial Performance of regency and municipal governments in Sumatra.

Keywords: Intergovernmental Transfers, Capital Expenditure, SILPA, Leverage, Local Government Financial Performance

INTRODUCTION

Pelaksanaan otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan salah satu prasyarat

terwujudnya *good governance* karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya publik secara optimal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, keberhasilan pemerintah daerah dalam

mengelola keuangan perlu dievaluasi melalui pengukuran kinerja keuangan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya keuangan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara berkelanjutan (Natalia & Suprpto, 2024). Salah satu indikator yang umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu rasio yang membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan transfer dan pinjaman daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian menunjukkan semakin besar kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerah secara mandiri, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin rendah (Mahmudi, 2021).

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di Pulau Sumatera masih relatif rendah. Berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan selama periode 2022–2024 hanya memiliki rasio kemandirian berkisar antara 4 persen hingga 14 persen. Sebaliknya, Kota Palembang memiliki rasio kemandirian yang jauh lebih tinggi, yaitu sebesar 59 persen pada tahun 2022, meningkat menjadi 62 persen pada tahun 2023, dan sebesar 51 persen pada tahun 2024. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan kemampuan fiskal antar pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan menggunakan sumber pendapatan sendiri. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat sehingga kinerja keuangan daerah belum sepenuhnya mencerminkan tercapainya tujuan otonomi daerah.

Berbagai faktor diduga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, salah

satunya adalah dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2021). Dana tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal. Namun, besarnya dana transfer juga dapat meningkatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kemampuan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah Daerah (Nugraheni et al., 2020). Oleh karena itu, hubungan antara dana perimbangan dan kinerja keuangan pemerintah daerah masih menjadi isu yang menarik untuk dikaji.

Selain dana perimbangan, belanja modal juga diperkirakan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu periode anggaran (Mahmudi, 2021). Peningkatan belanja modal diharapkan mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan aktivitas ekonomi daerah, dan pada akhirnya memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah (Nugraheni et al., 2020). Dengan demikian, pengalokasian belanja modal yang tepat menjadi salah satu indikator komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap kinerja keuangan adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran dalam satu tahun anggaran. Nilai SILPA dapat mencerminkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Di satu sisi, SILPA menunjukkan adanya sisa anggaran yang dapat dimanfaatkan pada tahun anggaran berikutnya, namun di sisi lain SILPA yang terlalu besar dapat mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan penyerapan anggaran belum berjalan secara optimal sehingga tujuan

pembangunan daerah belum tercapai secara maksimal (Mahmudi, 2021).

Selain itu, leverage juga diperkirakan memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Leverage menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam membiayai aset pemerintah daerah. Semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar pula beban kewajiban yang harus ditanggung pemerintah daerah sehingga dapat memengaruhi fleksibilitas fiskal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, tingkat leverage yang rendah menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan lebih banyak didukung oleh sumber daya internal sehingga kondisi keuangan daerah relatif lebih sehat (Mahmudi, 2021).

Hubungan antara dana perimbangan, belanja modal, SILPA, leverage, dan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*). Dalam perspektif sektor publik, masyarakat bertindak sebagai *principal* yang memberikan amanah kepada pemerintah daerah sebagai *agent* untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Pemerintah daerah dituntut mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya keuangan, mengalokasikan anggaran secara tepat, serta mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan tersebut melalui kinerja keuangan yang baik. Semakin optimal pengelolaan dana perimbangan, belanja modal, SILPA, dan leverage, maka semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah (Periansyah et al., 2021).

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Ratnasari dan Meirini (2022) menemukan bahwa dana perimbangan dan SILPA berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, sedangkan belanja modal berpengaruh positif. Sebaliknya, Putri dan Priyadi (2021) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan, sedangkan leverage dan belanja modal tidak berpengaruh. Penelitian Fitriani dan Syarif (2025) juga menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh positif, tetapi belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel masih memerlukan pengujian lebih lanjut pada karakteristik daerah yang berbeda.

Selain adanya inkonsistensi hasil penelitian, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan pada wilayah tertentu, seperti Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, Jambi, Sumatera Utara, maupun eks Karesidenan Pekalongan. Penelitian yang menggunakan cakupan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera masih relatif terbatas. Padahal, Pulau Sumatera memiliki karakteristik ekonomi, kapasitas fiskal, dan tingkat ketergantungan terhadap dana transfer yang beragam sehingga berpotensi menghasilkan temuan empiris yang berbeda. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel independen karena PAD merupakan komponen dalam perhitungan rasio kemandirian keuangan yang digunakan sebagai proksi kinerja keuangan, sehingga penggunaannya berpotensi menimbulkan hubungan mekanis (*mechanical relationship*) yang dapat memengaruhi hasil analisis. Penelitian ini juga memasukkan leverage sebagai variabel independen untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena rendahnya tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah di sebagian besar kabupaten dan kota di Pulau Sumatera serta masih adanya inkonsistensi hasil penelitian mengenai pengaruh dana perimbangan, belanja modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, diperlukan penelitian yang mampu memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian yang menguji keempat variabel tersebut secara

bersamaan pada seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera selama periode 2022–2024 masih terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, yaitu: (1) apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera; (2) apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera; (3) apakah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera; (4) apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera; dan (5) apakah dana perimbangan, belanja modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akuntansi sektor publik mengenai determinan kinerja keuangan pemerintah daerah serta menjadi masukan bagi pemerintah daerah

dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kemandirian fiskal.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksplanatori untuk menguji pengaruh dana perimbangan, belanja modal, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi penelitian meliputi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera yang berjumlah 140 pemerintah daerah. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (census sampling) sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Periode pengamatan mencakup tahun 2022–2024, sehingga diperoleh 420 unit observasi (140 pemerintah daerah × 3 tahun).

Penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan diperoleh melalui situs resmi BPK RI. Definisi operasional variabel penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala	Sumber Data
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	$\text{PAD} / (\text{Transfer Pusat} + \text{Transfer Provinsi} + \text{Pinjaman}) \times 100$ persen	Rasio	LKPD Kabupaten/Kota (BPK RI)
Dana Perimbangan (X1)	DBH + DAU + DAK	Rasio	LKPD Kabupaten/Kota (BPK RI)
Belanja Modal (X2)	Total Belanja Modal	Rasio	LKPD Kabupaten/Kota (BPK RI)
SILPA (X3)	Surplus/Defisit + Pembiayaan Netto	Rasio	LKPD Kabupaten/Kota (BPK RI)
Leverage (X4)	Total Utang / Total Aset	Rasio	LKPD Kabupaten/Kota (BPK RI)

Analisis data menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat

lunak EViews 12. Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KK_{it} = \alpha + \beta_1 DP_{it} + \beta_2 BM_{it} + \beta_3 SILPA_{it} + \beta_4 LEV_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (1)$$

di mana (KK) adalah kinerja keuangan pemerintah daerah, (DP) adalah dana perimbangan, (BM) adalah belanja modal, (SILPA) adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, (LEV) adalah leverage, (\alpha) adalah konstanta, (\beta) adalah koefisien regresi, (i) menunjukkan pemerintah kabupaten/kota, (t) menunjukkan tahun pengamatan, dan (\varepsilon) adalah error term.

Pemilihan model regresi panel dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk menentukan model terbaik di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM). Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi klasik yang disesuaikan dengan model terpilih. Apabila model yang digunakan adalah Random Effect Model (REM), maka pengujian meliputi uji normalitas dan uji multikolinearitas karena

estimasi dilakukan menggunakan metode Generalized Least Squares (GLS).

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen, uji F untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan, serta uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$).

RESULTS

Statistik Deskriptif

Penelitian menggunakan data panel pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera periode 2022–2024. Dari total 420 unit observasi, terdapat satu kabupaten (Kabupaten Batanghari) yang tidak dapat diikutsertakan karena data tidak tersedia (NA), sehingga jumlah observasi yang dianalisis menjadi **417 observasi**.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Minimum	Maximum
Kinerja Keuangan (Y)	417	0.125031	0.110353	0.010000	0.808000
Dana Perimbangan (X1)	417	2962.089	187.018	2062.000	3505.000
Belanja Modal (X2)	417	2278.548	297.342	1119.000	3209.000
SILPA (X3)	417	1.629841	0.500442	0.075000	2.945000
Leverage (X4)	417	0.026529	0.037909	0.000000	0.563000

Sumber: Output EViews 12, diolah (2026).

Berdasarkan Tabel 2, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 0,010000, nilai maksimum 0,808000, nilai rata-rata (mean) 0,125031, dan standar deviasi 0,110353, yang menunjukkan penyebaran data relatif rendah.

Dana Perimbangan (X1) memiliki nilai minimum 2062,000, nilai maksimum 3505,000, nilai rata-rata 2962,089, dan standar deviasi 187,018, yang menunjukkan variasi data antar pemerintah daerah relatif kecil.

Belanja Modal (X2) memiliki nilai minimum 1119,000, nilai maksimum

3209,000, nilai rata-rata 2278,548, dan standar deviasi 297,342, yang mengindikasikan adanya variasi belanja modal yang cukup besar antar pemerintah daerah.

SILPA (X3) memiliki nilai minimum 0,075000, nilai maksimum 2,945000, nilai rata-rata 1,629841, dan standar deviasi 0,500442, sehingga menunjukkan adanya variasi SILPA yang tergolong sedang.

Leverage (X4) memiliki nilai minimum 0,000000, nilai maksimum 0,563000, nilai rata-rata 0,026529, dan standar deviasi 0,037909, yang menunjukkan bahwa secara umum tingkat leverage pemerintah daerah relatif rendah dengan penyebaran data yang kecil.

Pemilihan model regresi panel dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman.

Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 3. Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian	Probabilitas Keputusan Model		
Chow Test	0.0000	Prob < 0,05	FEM
Hausman Test	0.9828	Prob > 0,05	REM

Sumber: Output EViews 12, diolah (2026)

Hasil Uji Chow menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,0000, sehingga model Fixed Effect Model (FEM) lebih baik dibandingkan Common Effect Model. Selanjutnya, hasil Uji Hausman menghasilkan nilai probabilitas 0,9828, sehingga model yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF).

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
Dana Perimbangan	2.506
Belanja Modal	2.528
SILPA	1.368
Leverage	1.198

Sumber: Output EViews 12, diolah (2026).

Seluruh variabel memiliki nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

4.4 Hasil Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pemilihan model, estimasi dilakukan menggunakan Random Effect Model (REM).

Tabel 5. Hasil Estimasi Regresi Data Panel

Variabel	Koefisien
Konstanta	-0.168399

Variabel	Koefisien
Dana Perimbangan	4.268476
Belanja Modal	8.073215
SILPA	-0.009806
Leverage	-0.034543

Sumber: Output EViews 12, diolah (2026).

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:
 $KK = -0.168399 + 4.268476DP + 8.073215BM - 0.009806SILPA - 0.034543LEV$

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Perimbangan dan Belanja Modal memiliki koefisien positif, sedangkan SILPA dan Leverage memiliki koefisien negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengujian Hipotesis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Adjusted R^2	R^2
0.065570	-

Sumber: Output EViews 12, diolah (2026).

Nilai Adjusted R^2 sebesar 0,0656 menunjukkan bahwa variabel dana perimbangan, belanja modal, SILPA, dan leverage mampu menjelaskan 6,56 persen variasi kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan 93,44 persen dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji F

F-hitung	F-tabel	Probabilitas	Keputusan
8.280308	2.39	0.000002	H ₅ diterima

Sumber: Output EViews 12, diolah (2026).

Nilai F-hitung (8,280308) lebih besar dibandingkan F-tabel (2,39) dengan

nilai probabilitas 0,000002 (kurang dari 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa dana perimbangan, belanja modal, SILPA, dan leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Parsial

Variabel	Koefisien	t-hitung	Prob.	Keputusan
Dana Perimbangan	4.268476	1.239528	0.2159	H ₁ Ditolak
Belanja Modal	8.073215	4.130763	0.0000	H ₂ Diterima
SILPA	-0.009806	-1.164058	0.2451	H ₃ Ditolak
Leverage	-0.034543	-0.328070	0.7430	H ₄ Ditolak

Sumber: Output EViews 12, diolah (2026).

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa belanja modal merupakan satu-satunya variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (p kurang dari 0,05).

Sementara itu, dana perimbangan, SILPA, dan leverage tidak berpengaruh signifikan karena masing-masing memiliki nilai probabilitas di atas 0,05.

Tabel 9. Ringkasan Hasil Hipotesis

Hipotesis	Hasil
H ₁ : Dana Perimbangan → Kinerja Keuangan	Ditolak
H ₂ : Belanja Modal → Kinerja Keuangan	Diterima
H ₃ : SILPA → Kinerja Keuangan	Ditolak
H ₄ : Leverage → Kinerja Keuangan	Ditolak
H ₅ : Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA, dan Leverage → Kinerja Keuangan	Diterima

DISCUSSION

1. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ($t = 1,239528$; $\text{Sig.} = 0,2159 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa besarnya Dana Perimbangan yang diterima pemerintah daerah belum mampu meningkatkan kinerja keuangan yang diprosikan dengan rasio kemandirian keuangan daerah.

Secara teoritis, Dana Perimbangan merupakan sumber pembiayaan dari pemerintah pusat yang bertujuan mendukung penyelenggaraan

pemerintahan daerah. Namun, karena rasio kemandirian keuangan lebih menitikberatkan pada kemampuan daerah menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan Dana Perimbangan tidak secara otomatis meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dalam perspektif Teori Keagenan, pemerintah daerah sebagai *agent* dituntut mengelola seluruh sumber daya keuangan secara efektif, tetapi keberhasilan tersebut lebih ditentukan oleh kemampuan meningkatkan PAD dibandingkan besarnya dana transfer dari pemerintah pusat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Putra et al. (2024) yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun demikian,

hasil ini berbeda dengan Putri dan Priyadi (2021) yang menemukan pengaruh positif. Perbedaan tersebut diduga dipengaruhi oleh karakteristik daerah, periode penelitian, jumlah sampel, serta efektivitas pemanfaatan Dana Perimbangan di masing-masing daerah.

2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ($t = 4,130763$; $\text{Sig.} = 0,0000$ kurang dari $0,05$). Artinya, peningkatan alokasi Belanja Modal mampu mendorong peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Belanja Modal mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam penyediaan aset tetap, seperti jalan, gedung, sarana pendidikan, dan infrastruktur lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi. Dalam Teori Keagenan, pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran secara optimal agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan aktivitas ekonomi, memperluas basis PAD, dan pada akhirnya meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan **Ratnasari dan Meirini (2022)** yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sebaliknya, **Putri dan Priyadi (2021)** menemukan hasil yang berbeda, yang diduga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi fiskal, efektivitas pengelolaan aset, dan karakteristik daerah penelitian.

3. Pengaruh SILPA terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa SILPA tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ($t = -1,164058$; $\text{Sig.} = 0,2451 > 0,05$). Dengan demikian, besar kecilnya SILPA belum mampu menjelaskan perubahan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Secara konseptual, SILPA dapat menjadi sumber pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya. Namun, SILPA yang tinggi tidak selalu menunjukkan kondisi keuangan yang baik karena dapat mencerminkan rendahnya penyerapan anggaran atau tertundanya pelaksanaan program. Selain itu, rasio kemandirian keuangan lebih dipengaruhi oleh kemampuan menghasilkan PAD daripada besarnya SILPA. Berdasarkan Teori Keagenan, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak diukur dari besarnya sisa anggaran, melainkan dari efektivitas pemanfaatan anggaran untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Putri dan Dyah (2023) yang menyatakan bahwa SILPA tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Namun, hasil tersebut berbeda dengan penelitian Fitriani dan Syarif (2025) yang menemukan adanya pengaruh positif, yang diduga dipengaruhi oleh perbedaan tingkat penyerapan anggaran dan karakteristik daerah.

4. Pengaruh Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ($t = -0,328070$; $\text{Sig.} = 0,7430 > 0,05$). Dengan demikian, tingkat kewajiban pemerintah daerah belum menjadi faktor yang menentukan kinerja keuangan.

Secara teoritis, Leverage dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan apabila dimanfaatkan secara produktif. Akan tetapi, dalam penelitian ini kinerja keuangan diukur menggunakan rasio kemandirian keuangan yang lebih menekankan kemampuan menghasilkan PAD. Berdasarkan Teori Keagenan, keberhasilan pengelolaan keuangan lebih ditentukan oleh optimalisasi pendapatan daerah daripada besarnya utang. Selain itu, sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Pulau Sumatera memiliki tingkat utang yang relatif rendah sehingga kontribusi Leverage terhadap pembiayaan daerah masih terbatas.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Putri dan Priyadi (2021) yang menyatakan bahwa Leverage tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sebaliknya, Adinata dan Efendi (2022) menemukan pengaruh positif, yang kemungkinan dipengaruhi oleh perbedaan struktur pembiayaan, kondisi fiskal, dan efektivitas pemanfaatan utang daerah.

5. Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA, dan Leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah ($F = 8,280308$; Sig. = 0,000002 kurang dari 0,05).

Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kombinasi berbagai aspek pengelolaan keuangan. Dana Perimbangan menyediakan dukungan fiskal dari pemerintah pusat, Belanja Modal berkontribusi melalui pembangunan infrastruktur, SILPA mencerminkan hasil pengelolaan anggaran, sedangkan Leverage menggambarkan struktur pembiayaan daerah. Meskipun secara parsial tidak seluruh variabel berpengaruh signifikan, secara simultan keempat variabel mampu menjelaskan variasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Ratnasari dan Meirini (2022) serta Fitriani dan Syarif (2025) yang menyatakan bahwa faktor-faktor keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Temuan serupa juga dilaporkan oleh Afia et al. (2021) dan Putri dan Priyadi (2021), yang menegaskan bahwa peningkatan kinerja keuangan daerah merupakan hasil dari pengelolaan berbagai komponen keuangan secara terpadu, bukan hanya ditentukan oleh satu variabel tertentu.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera periode 2022–2024. Sebaliknya, Dana Perimbangan, SILPA, dan Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara simultan, Dana Perimbangan, Belanja Modal, SILPA, dan Leverage berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan berkontribusi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan pengalokasian Belanja Modal karena terbukti mampu meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, serta terus meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Perimbangan, SILPA, dan Leverage. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain serta memperpanjang periode pengamatan agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

REFERENCE

- Adinata, M. P., & Efendi, D. (2022). *Pengaruh leverage, ukuran pemerintahan daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Jawa Timur*.
- Afia, M., Mustafa, A., & Salsa, F. N. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*, 5(2). <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2017–2020, 3(1), 198–209.
- Fitriani, N., & Syarif, D. (2025). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja

- modal, dan SILPA terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah kabupaten di Jawa Barat tahun 2016–2023. 7(1). <https://doi.org/10.32877/ef.v7i1.2111>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Dalam *The Economic Nature of the Firm: A Reader* (3rd ed., pp. 283–303).
- Mahmudi. (2021). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.
- Natalia, N., & Suprpto, W. (2024). Pengaruh dana perimbangan, belanja modal, dan fiscal stress terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, 10(1), 73–86.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Periansyah, Dewata, E., Sari, Y., & Nouvanti, F. (2021). The effect of locally generated revenue as an intervening variable on the financial performance of the regional government of South Sumatra Province. <https://doi.org/10.32602/jafas.2021.034>
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
- Putra, I. K., Rahayu, S., & Friyani, R. (2024). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi, 13, 516–531. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v13i1.1049>
- Putri, S. P., & Dyah, R. (2023). Pengaruh PAD, dana perimbangan, dan SILPA terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, 6(2), 2068–2082.
- Putri, S. T., & Priyadi, M. P. (2021). *Pengaruh leverage, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*.
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan SILPA dalam pengaruhnya terhadap kinerja keuangan. 17, 38–47.
- Setiabudi, M., Wulandari, H. K., & Ardelia, I. N. (2022). Modal, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris kabupaten dan kota se-Eks Karesidenan Pekalongan periode 2016–2020). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 7(1), 60–81. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Suandani, P., Putu, I. G., & Astawa, B. (2021). Pengaruh opini audit, belanja modal, pendapatan asli daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2015–2019, 728–739.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.